

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang Undang No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/IV/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Buku

Dwi Haryadi. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyverporn di Indonesia*. (Yogyakarta: Lima. 2013). hlm. 1

Djisman Samosir, 2013, *Senengam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, hl.108

Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, Maju Mundur, Bandung, 2007, hlm.22

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Piana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm.19
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14
- Bambang Waluyu, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 15-16
- Irwan, 2013. Metodologi Penelitian Hukum, Makalah, Universitas Labuhanbatu, Sumatera Utara, hlm. 7
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press,2020), hlm. 56
- Said, Fadillah, Dwi Andriyanto, Retno Sari, and Windu Gata. "Perancangan Validasi Permohonan Narasumber Pada Sistem Informasi Permohonan Narasumber Menggunakan Finite State Automata." *Paradig.-J. Komput. dan Inform* Vol. 22 No. 2 September 2020, hlm. 189.
- Nana Sudjana. 1989, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Sinar Baru, Bandung. Hlm.64
- Syafrida Hafni Sahir, 2021, Metodologi penelitian, KBM Indonesia, Jogjakarta, hlm. 6.
- Maria S.W. Sumardjono. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 27.
- Sulitstyo Basuki. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), hm. 171
- Syafrida Hafni Sahir, 2021, Metodologi penelitian, KBM Indonesia, Jogjakarta, hlm. 6.
- Moh, Nasir, 1988, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm.56
- PAF, Lamintang. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Baru.
- Eddy O.S Hiariej. 2016. "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*". Cahaya Atma Pustaka, Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dwi Haryadi. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyverporn di Indonesia*. (Yogyakarta: Lima. 2013). hlm. 1

3. Artikel Jurnal

Raodia, “ Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*)”, *Jurisprudentie*, Vol 6, No 2, Desember 2019.

Dewi Bunga. “Politik Hukum Pidana terhadap Penanggulangan *Cybercrime*”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16, No. 1 (Maret, 2019): hlm. 2.

Christian, Herry, “Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender *Online* Dalam Paradigma Hukum Indonesia”, *Binamulia Hukum*, Vol. 9 No. 1 Juli 2022 (83-92)

Sri Wiyanti Eddyono. “*Pencegahan, Penanganan, dan Pelaporan Kejahatan Siber Kekerasan Seksual Berbasis Online*”. Universitas Gadjah Mada

Nikmah, Asna. “*Kesinkronan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekeraan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*” Novum: Jurnal Hukum. 2023

Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Jurnal Pembangunan Huum Indonesia* Vol.4, No. 2 (2022)

Alessandra Carlton, “Sextortion: The Hybrid “Cyber-Sex Crime”, *North Carolina Journal of Law & Technology*, Vol.21, Issue 3, Maret 2020

Delviero, J, Zarqa, F. D, Sputra, M. A. Y, & Wijaya, M. K. A. “Eksistensi Regulasi Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Berdasarkan Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol .9 , No 14 (2023)

Margaret,E. “*Posttraumatic Growth Pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekekranan Seksual*”, *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol.7 (2018).

Christian, Herry, “Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender *Online* Dalam Paradigma Hukum Indonesia”, *Binamulia Hukum*, Vol. 9 No. 1 Juli 2022 (83-92)

Sri Wiyanti E, *Kekerasan Seksual Berbasis Online dan Perlindungan Korban: Pentingnya Pengaturan Hukum Yang Komprehensif dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. YLBH APIK Jakarta. (2021)

Vannesa Gan, “Penegakan Hukum bagi Pelaku dan Perlindungan Hukum bagi korban terkait sekstorsi dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Bhirawa Law Journal*, Vol.4, November 2023

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm.19

Dialogia Luridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. Vo.11(1) , November 2019.

Firma.S, Irma.M. “*Fungsi Senra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Dalam Upaya Pelayanan Prima Kepolisian Kepada Masyarakat*”. Justitiable Universitas Diponegoro. Vol.6 No.1. 2023.

Okamaisya S, Perempuan dan *Revenge Porn*: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi, Vol. 2, No.1 (2021)

Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, “Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7, Nomor 1, Juni 2020, hlm 2.

Said, Fadillah, Dwi Andriyanto, Retno Sari, and Windu Gata. "Perancangan Validasi Permohonan Narasumber Pada Sistem Informasi Permohonan Narasumber Menggunakan Finite State Automata." *Paradig.-J. Komput. dan Inform* Vol. 22 No. 2 September 2020, hlm. 189.

Vannesa Gan, “Penegakan Hukum bagi Pelaku dan Perlindungan Hukum bagi korban terkait sekstorsi dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Bhirawa Law Journal*, Vol.4, November 2023

Alessandra Carlton, “Sextortion: The Hybrid “Cyber-Sex Crime”, *North Carolina Journal of Law & Technology*, Vol.21, Issue 3, Maret 2020

Prasetyo. “Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik *Cyber Crime* dalam Kejahatan Dunia Maya di Wilayah Hukum POLDA DIY” *Indonesia Journal of Crminal Law and Criminology* Vol.1 No.2 2022

4. Tugas Akhir

Tri Melinnia, 2023, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Sekstorsi oleh Kepolisian Daerah Riau di Kota Pekanbaru*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hasna Farida, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap para pihak dalam Perjanjian Waralaba Bakso Tengkleng Mas Bambang Cabang Kabupaten Sukoharjo*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 50

5. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka.
Jakarta

6. Internet

Nendensan, *Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Onlie (KBGO)*, <https://nendensan.medium.com/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-a4ec1bd95632> (diakses 10 Februari 2024)

Komnas Perempuan, *“Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Penigkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan”* <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan> (diakses 10 Februari 2024)

Komnas Perempuan *“Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan”* <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan> (diakses 12 Januari 2024)

Siti Aminah *“Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman: Belajar dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Siber di Mancanegara”* <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/bergerak-bersama-membangun-ruang-siber-aman-belajar-dari-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-siber-di-mancanegara> (diakses 10 Desember 2023).

Shelby Dolch, *Sextortion: The Impact on Judging and Courts*. <https://www.iawj.org/sextortion-impact-on-judging-and-courts-asean> (diakses 17 Maret 2024)

Baker, Linda. Violence Against Women Learning Network. “Technology-Related Violence Against Women”.
https://www.vawlearningnetwork.ca/ourwork/issuebased_newsletters/issue_4/Issue_4_LN_Newsletter_2013_Online.pdf (diakses 10 Desember 2023).

Pathumporn, Thongking. World Health Organization, “Violence Against Women”
https://www.who.int/health-topics/violence-against-women#tab=tab_1
(diakses 10 Februari 2024)

Zahra, Fatimah. “UU TPKS Berlaku, Mengapa Korban Kekerasan Seksual Belum Juga Aman”,
[https://ykp.or.id/uu-tpks-berlaku-mengapa-korban-kekerasan-seksual-belum-juga-aman/#:~:text=DPR%20dan%20pemerintah%20telah%20mengesahkan,TPKS\)%20pada%2012%20April%202022.](https://ykp.or.id/uu-tpks-berlaku-mengapa-korban-kekerasan-seksual-belum-juga-aman/#:~:text=DPR%20dan%20pemerintah%20telah%20mengesahkan,TPKS)%20pada%2012%20April%202022.) (diakses 15 Februari 2024)

Rusti Dian, Indonesia Peringkat Pertama Sextortion di Asia: Alarm Bahaya Korupsi dan Kekerasan Seksual. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/indonesia-peringkat-pertama-sextortion-di-asia-alarm-bahaya-korupsi-dan-kekerasan-seksual> (diakses 25 Maret 2024)

Rangkuti,Maksum. Proses Hukum Acara Pidana. <https://fahum.umsu.ac.id/proses-hukum-acara-pidana/> (diakses 20 Februari 2024)

Thea,Ady. 9 Tantangan Pelaksanaan UU TPKS.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/9-tantangan-pelaksanaan-uu-tpks-lt645da75a5c46d/?page=1> (diakses 20 Februari 2024)

Sri Wiyanti E, *Kekerasan Seksual Berbasis Online dan Perlindungan Korban: Pentingnya Pengaturan Hukum Yang Komprehensif dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. YLBH APIK Jakarta. (2021)

Aji Prasetyo, Mengenal Sextortion, Modus Korupsi Baru di Negara Maju.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-sextortion--modus-korupsi-baru-di-negara-maju-lt640c91162177e/?page=2> (diakses 17 Maret 2024)

Sonya Hellen. “Kasus Terus Mencuat, Impelementasi UU TPKS Masih Terhambat”,
<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/11/kasus-terus-mencuat-implementasi-uu-tpks-masih-terhambat> (diakses 1 Mei 2024)

Rangkuti,Maksum. Proses Hukum Acara Pidana. <https://fahum.umsu.ac.id/proses-hukum-acara-pidana/> (diakses 20 Februari 2024)

Rusti Dian, Indonesia Peringkat Pertama Sextortion di Asia: Alarm Bahaya Korupsi dan Kekerasan Seksual. <https://narasi.tv/read/narasi->

[daily/indonesia-peringkat-pertama-sextortion-di-asia-alarm-bahaya-korupsi-dan-kekerasan-seksual](#) (diakses 25 Maret 2024)

Hukumonline, “Tahapan dan Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ruang-lingkup-politik-hukum-pidana-1t65eacd30c87bc/?page=2> , diakses 27 Juli 2024.

Valerie Augustine. “3 Asas Hukum: *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior* Beserta Contohnya. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/> diakses 29 Juli 2024

Ahmad Fijarsyah. Konsepsi Ajaran Logische Specialiteit dan Systematische Specialiteit. https://www.pn-sampit.go.id/s4mp1t/images/LAPORAN_PN_SAMPIT/2020/KONSEPSI_AJARAN_LOGISCHE_SPECIALITEIT.pdf

Purnomo,S. Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksana. <https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/#:~:text=Peraturan%20Pelaksanaan%20yang%20dimaksud%20disini,dalam%20rangka%20melaksanakan%20undang%20Dundang.> Diakses 30 Juli 2024

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Penyidik Enggan Terapkan UU TPKS, Didik Mukrianto Desak Terbitkan Aturan Teknis”.
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44848/t/javascript>; diakses 1 Agustus 2024

Ratna Batara. “The Voice: Sejumlah Polisi Tolak Gunakan UU TPKS, Tantangan Berat Penanganan Korban”. <https://www.konde.co/2023/01/the-voice-sejumlah-polisi-tolak-gunakan-uu-tpks-tantangan-berat-penanganan-korban-kekerasan-seksual/> diakses 31 Juli 2024.

Neil Shouse, ”What is Sextortion under California Law”
<https://www.shouselaw.com/ca/blog/felony/what-is-sextortion-under-california-law/#:~:text=Attempted%20sextortion%20is%20a%20California,in%20state%20prison%2C%20and%20For> (diakses 18 Maret 2024)

Nendensan, Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online.
<https://nendensan.medium.com/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-a4ec1bd95632> (diakses 15 Februari 2024)

Jarryd Bartle, “Australlia: Sextortion Laws in Australia”
<https://www.mondaq.com/australia/crime/1397540/sextortion-laws-in-australia#:~:text=Sextortion%20is%20criminalised%20in%20Australia,m>

enace%2C%20harass%20or%20cause%20offence. (diakses 18 Maret 2024)

Thea,Ady. 9 Tantangan Pelaksanaan UU TPKS.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/9-tantangan-pelaksanaan-uu-tpks-lt645da75a5c46d/?page=1> (diakses 20 Februari 2024)

Zahra, Fatimah. “UU TPKS Berlaku, Mengapa Korban Kekerasan Seksual Belum Juga Aman”, [https://ykp.or.id/uu-tpks-berlaku-mengapa-korban-kekerasan-seksual-belum-juga-aman/#:~:text=DPR%20dan%20pemerintah%20telah%20mengesahkan,TPKS\)%20pada%2012%20April%202022](https://ykp.or.id/uu-tpks-berlaku-mengapa-korban-kekerasan-seksual-belum-juga-aman/#:~:text=DPR%20dan%20pemerintah%20telah%20mengesahkan,TPKS)%20pada%2012%20April%202022). (diakses 15 Februari 2024)

Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak, *Lindungi Korban Kekerasan Seksual, Pemerintah Kembali Terbitkan Satu Peraturan Turunan UU TPKS.* <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE2MQ==> diakses 15 Agustus 2024.